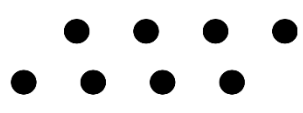


LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIBUNAL I - TAHUN 2026

KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAREN

Jalan Raya Laren Nomor 09, Lamongan, Jawa Timur 62262,
Telepon (0322) 313845, Pos-el laren@lamongan.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Laren, 30 Maret 2026

Nomor : 700.1.2.7/ 99 /413.308/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan I Kecamatan Laren
Tahun 2026

Kepada Yth. Bupati Lamongan
di
Lamongan

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan laporan pengelolaan risiko tribulan I Tahun 2026
Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir
Demikian untuk menjadi periksa.



Camat Laren

Sukur, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk I

NIP. 196806211993041001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :





- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
 2. Unit Kepatuhan Risiko Kabupaten Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAREN

Jalan Raya Laren Nomor 09, Lamongan, Jawa Timur 62262,
Telepon (0322) 313845, Pos-el laren@lamongan.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700.1.2.7/ 98 /413.308/2026
TANGGAL	:	Desember 2026

Disiapkan Oleh	:	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian  BELLA ANGGIE NURJANAH, S.A.P. NIP. 199807132026042008
Diperiksa Oleh	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian  SYLVIA HANDRIYANI, S.T. NIP. 198105222006042024
Disahkan Oleh	:	Camat Laren   SUKUR, S.Pd., M.Pd. NIP. 196806211993041001

LAPORAN PENGELOLAN RISIKO

KECAMATAN LAREN

KABUPATEN LAMONGAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, setiap perangkat daerah diwajibkan menerapkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Kecamatan Laren sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan pemerintahan desa memiliki berbagai potensi risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Risiko tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pelayanan, partisipasi masyarakat, serta kendala teknis lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan risiko yang terencana dan terstruktur guna meminimalisir dampak yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis Kecamatan Laren, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pengelolaan risiko antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Penyelenggaraan SPIP.

4. Peraturan Bupati Lamongan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
5. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Kecamatan Laren dimaksudkan sebagai pedoman dan dokumentasi dalam pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kecamatan Laren, melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, serta pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan penyusunan laporan pengelolaan risiko ini adalah:

1. Mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Laren.
2. Menyusun langkah pengendalian untuk meminimalisir dampak risiko.
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

D. Manajemen risiko pada Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

- a. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- b. Identifikasi risiko;
- c. Analisis risiko;
- d. Evaluasi risiko;
- e. Pengendalian risiko;
- f. Pemantauan dan telaah ulang;
- g. Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan sebagaimana terlampir :

Formulir Kertas Kerja				
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan				
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Penyampaian nilai integritas dan kode etik kepada pegawai belum dilakukan secara optimal serta mekanisme penanganan pelanggaran etika masih perlu diperkuat.	Melaksanakan sosialisasi rutin terkait nilai integritas dan kode etik pegawai serta membentuk mekanisme penanganan pelanggaran etika yang jelas dan terdokumentasi.	Camat/Sekretaris Camat	April - Juni 2026
2	Strategi peningkatan kompetensi pegawai dan pelaksanaan pelatihan terkait pengelolaan risiko masih belum optimal	Menyusun program peningkatan kompetensi pegawai serta mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/bimtek pengelolaan risiko secara berkala.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Juli - Oktober 2026
3	Peran pimpinan dalam mendorong peningkatan kinerja pegawai dan komunikasi terkait pengelolaan risiko masih perlu ditingkatkan.	Meningkatkan peran pimpinan melalui rapat koordinasi rutin, monitoring kinerja pegawai, serta penguatan komunikasi internal terkait pengelolaan risiko.	Camat	April - Juni 2026
4	Kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan risiko masih belum optimal.	Menyusun dan menetapkan uraian tugas (job description) serta pembagian peran yang jelas dalam pengelolaan risiko.	Sekretaris Camat	April - Juni 2026
5	Pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab belum sepenuhnya berjalan secara efektif.	Mengoptimalkan pendelegasian wewenang melalui penetapan SK dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas.	Camat	April - Juni 2026
6	Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan.	Menyusun rencana pengembangan SDM yang mendukung manajemen risiko serta melakukan evaluasi kebutuhan kompetensi pegawai.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Juli - Oktober 2026
7	Pelaksanaan reviu dan tindak lanjut hasil pengawasan oleh APIP belum berjalan secara optimal.	Melaksanakan reviu berkala atas tindak lanjut hasil pengawasan APIP serta memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti dan terdokumentasi dengan baik.	Sekretaris Camat	April - Juni 2026
8	Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan risiko.	Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait melalui rapat koordinasi rutin dan forum komunikasi dalam rangka mendukung pengawasan dan pengelolaan risiko.	Camat	April - Juni 2026

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Formulir Kertas Kerja									
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada dan Masih Dibutuhkan									
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lainnya								
Dinas Terkait	Kecamatan Laren								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan RTP
Risiko Strategis OPD Kecamatan Laren:									
1	Pelayanan administrasi kepada masyarakat belum optimal	RSO.26.99.48.01	Pelayanan sesuai SOP dan standar pelayanan	SOP belum dipahami seluruh pegawai	Sosialisasi SOP dan peningkatan kualitas pelayanan	Camat Laren	Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
2	Target SAKIP tidak tercapai	RSO.26.99.48.02	Monitoring dan evaluasi kinerja	Evaluasi belum rutin	Penguatan movev dan penyusunan rencana aksi kinerja	Camat Laren	Januari - Maret 2026	Januari 2026	https://drive.google.com/drive/uo/folders/1YFh_ykWA2ko5SEY2CphKJL1R0hLh2Bm
3	Sasaran strategis tidak tercapai	RSO.26.99.48.03	Perencanaan berbasis kinerja	Indikator belum optimal	Penyempurnaan indikator dan monitoring capaian	Camat	April - Juni 2026	Belum Dilaksanakan	-

Risiko Operasional OPD

Kecamatan Laren:

1	Terjadinya ketidaksinkronan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	ROO.26.99.48.01	Koordinasi perencanaan dan penganggaran	Sinkronisasi belum optimal	Rakor perencanaan dan evaluasi berkala	Sekretaris Kecamatan dan Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
2	Terjadinya kesalahan dan/atau keterlibatan dalam administrasi keuangan perangkat daerah.	ROO.26.99.48.02	Verifikasi berkas dan SOP keuangan	Ketelitian petugas masih kurang	Peningkatan pengawasan dan pelatihan pengelolaan keuangan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
3	Terjadinya ketidaktertiban dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah.	RSO.26.99.48.03	Penataan arsip dan administrasi	Belum tertib dan terdokumentasi baik	Penataan arsip dan penerapan tata naskah dinas	Kasubag Umum dan Kepegawaian	April - Juni 2026	Belum Dilaksanakan	-
4	Terjadinya ketidakesesuaian dalam proses pengadaan barang milik daerah.	RSO.26.99.48.04	Pelaksanaan sesuai aturan pengadaan	Pengawasan belum optimal	Penguatan pengawasan dan kepatuhan pengadaan	PPTK	Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
5	Terjadinya ketidakesesuaian dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	RSO.26.99.48.05	Pemeriksaan barang dilakukan oleh PPTK	Dokumentasi pemeriksaan belum optimal	Meningkatkan verifikasi dan dokumentasi pemeriksaan barang	PPTK	Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
6	Terjadinya ketidakterlaksanaan atau ketidakesesuaian pemeliharaan barang milik daerah.	RSO.26.99.48.06	Pemeliharaan aset dilaporkan oleh petugas	Verifikasi laporan pemeliharaan belum optimal	Verifikasi fisik aset dan dokumentasi kegiatan pemeliharaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
7	Tidak optimalnya efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.	RSO.26.99.48.07	Pelayanan adminduk dilaksanakan melalui loket	Standar penyelesaian waktu pelayanan belum konsisten	Monitoring pelayanan dan evaluasi SOP pelayanan	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Desember	Belum Dilaksanakan	-
8	Tidak optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa	RSO.26.99.48.08	Kecamatan mengundang desa dalam rapat koordinasi	Kehadiran desa belum konsisten	Penguatan komunikasi dan jadwal rakor desa	Kepala Seksi PPM	Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
9	Terjadinya ketidaktertiban dalam administrasi kepegawaian perangkat daerah.	RSO.26.99.48.09	Pengelolaan data kepegawaian	Data belum update	Pemutakhiran data dan penataan administrasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	April - Juni 2026	Belum Dilaksanakan	-
10	Tidak optimalnya koordinasi dalam penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.	RSO.26.99.48.10	Koordinasi dengan muspika dan tokoh masyarakat	Mekanisme penanganan konflik belum terstruktur	Pembentukan tim penanganan konflik kecamatan	Kepala Seksi Trantibum	Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
11	Tidak optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).	RSO.26.99.48.11	Kegiatan pembinaan PKK dilaksanakan berkala	Partisipasi pengurus masih rendah	Sosialisasi kegiatan dan peningkatan kemitraan dengan pengurus masyarakat	Kepala Seksi PPM	Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
12	Tidak optimalnya fasilitas, rekomendasi, dan koordinasi dalam pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa.	RSO.26.99.48.12	Monitoring laporan desa dilakukan berkala	Validasi laporan desa masih terbatas	Verifikasi dokumen dan koordinasi dengan Pendamping Desa dan PPM	Kepala Seksi Pemerintahan	Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-

III. HAMBATAN

Pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan pada Tribulan I Tahun 2026 masih menghadapi beberapa kendala yang berdampak pada perbedaan antara rencana dengan realisasi. Hambatan-hambatan ini bersumber dari keterbatasan internal maupun faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pihak Kecamatan. Berikut ini adalah uraian faktor penghambat yang diidentifikasi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara teknis pengelolaan risiko.
2. Gangguan jaringan internet yang dapat mempengaruhi pelayanan administrasi kepada masyarakat.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
5. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan beberapa program kegiatan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Kecamatan Laren monitoring risiko dilaksanakan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, koordinasi antar perangkat pelaksana, serta pelaporan secara berkala kepada pimpinan. Monitoring juga dilakukan untuk melihat perkembangan risiko yang telah diidentifikasi serta kemungkinan munculnya risiko baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun beberapa langkah RTP yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada unit pelayanan.
2. Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan dengan meningkatkan pengendalian internal dan memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui sosialisasi, pembinaan, serta pelibatan masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).
4. Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.
5. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi kendala teknis seperti gangguan jaringan internet yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

V. PENUTUP

Pengelolaan risiko merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Melalui penerapan manajemen risiko, Kecamatan Laren dapat mengidentifikasi berbagai potensi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mengambil langkah pengendalian yang tepat.

Dengan adanya laporan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Laren sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Ke depan, Kecamatan Laren akan terus meningkatkan penerapan pengelolaan risiko melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.